



PERUBAHAN RENJA

KECAMATAN KOTA BANGUN

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN

Jalan : Ki Hajar Dewantara Kota Bangun Telp. 0541-6668674 Kode Pos 75561

KEPUTUSAN
CAMAT KOTA BANGUN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P. 365 /KEC.KOBA/RENJA2024/01/ 2024

TENTANG
PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENJA DAN RENJA
PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTA BANGUN
TAHUN 2024

CAMAT KOTA BANGUN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan pengelolaan penyelenggaraan rutinitas kerja berjalan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Personalia Tim Penyusunan Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara tahun 2024;
 - b. Untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dan diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004;
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020.
- Memperhatikan :
- 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat
 - 2. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. NOMOR 566/SK BUP/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023;
 - 3. Berdasarkan RKA dan DPA Belanja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN TENTANG PERSONALIA
PENYUSUNAN RENJA DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN KOTA BANGUN TAHUN 2024.
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 04 Januari 2024 menetapkan Personalia
Penyusunan Renja DAN Renja Perubahan Kecamatan 2024 pada
Perangkat Daerah KECAMATAN KOTA BANGUN Kabupaten Kutai
Kartanegara.
- KEDUA : Personalia yang diangkat dalam jabatan tersebut dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada CAMAT KOTA BANGUN selaku
atasan/pimpinan PD KECAMATAN KOTA BANGUN Kabupaten Kutai
Kartanegara
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkan Surat
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
melalui DPA/DPPA Perangkat Daerah KECAMATAN KOTA BANGUN
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bangun
pada tanggal 04 Januari 2024

Camat Kota Bangun,

Drs. Mawardi
Pembina Tk I
NIP. 196608252006041005

LAMPIRAN TENTANG PERSONALIA PENYUSUNAN
RENJA DAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KOTA BANGUN TAHUN 2024

NOMOR : P. 365 /KEC.KOBA/RENJA2024/01/ 2024
TANGGAL : Januari 2024

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. MAWARDI	PENGARAH / PENANGGUNGJAWAB	CAMAT
2	Abdul Karim , S.Pd	KETUA	SEKCAM
3	Supriadi, S.IP	SEKRETARIS	KASI PMD
4	Suriansyah , SE	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
5	Drs. Syahminan	ANGGOTA	KASI PELAYANAN UMUM
6	Hj. Herlinawaty, SE	ANGGOTA	KASUBAG. UMUM, TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN
7	Agus Sopian, S.IP	ANGGOTA	KASI KESSOS
8	Murlian, S.AP	ANGGOTA	KASUBAG. PENYUSUNAN PROGKEU
9	Staf Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan	ANGGOTA	

Camat Kota Bangun,

Drs. Mawardi
Pembina Tk I
NIP. 196608252006041005

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Perubahan Rencana Kerja Perubahan Renja Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun. Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kantor Camat Kota Bangun dalam tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan hasil Penyusunan Perubahan Renja 2024 ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada pada Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sesuai dengan program / kegiatan yang ada.

Didalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan waktu yang terbatas, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Renja 2024 di Kecamatan Kota Bangun.

Akhirnya diharapkan Rencana Kerja(Renja) Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kota Bangun, 26 Agustus 2024
Camat Kota Bangun,



Ers. Mawardi

NIP. 19660825 199403 1 008

DAFTAR ISI

		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar belakang.....	2
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD.....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
	3.1 Program dan kegiatan	16
BAB IV	PENUTUP	23
	4.1 Penutup	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Perubahan Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Perubahan Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal Perangkat Daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing

Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kota Bangun menyusun Renja Perubahan PD Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun setelah pemekaran kecamatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kecamatan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 07 juli 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renja

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- Sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun tahun 2024 dalam rencana program prioritas.
- Sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Kota Bangun dan kegiatan Pembangunan daerah yang menjadi sehingga terwujudnya efisiensi alokasi berbagai sumber daya

1.3.1 Tujuan Penyusunan Perubahan Renja

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun 2024 ini adalah :

- Terwujudnya sinergi program dan kegiatan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
- Menciptakan kepastian program kegiatan dalam perencanaan alokasi sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
- Sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II .EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Rencana Kerja (Renja) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021– 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2023 DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Program/ Kegiatan (Nomeklatur	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
				Target RENJA-PD Tahun 2024	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100		0			
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	88.1	88.1	88.10		0			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	25	0	0	0	0		0	0
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25	5	0	0	0		5	20
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	30	0	0	0	0		0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	4	0	0	0	0		0	0
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	20	4	0	0	0		4	20
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	80	0	0	0	0		0	0
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	180	36	0	0	0		36	20
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	20	4	0	0	0		4	20
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	2	2		0		2	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	25	5	0	0	0		5	20
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	250	50	3	2	66.67		52	21
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	400	80	80	52	65.0		132	33
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	68	66.67	66.67		0		66.67	98
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	195	33	33		0		33	17
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	750	150	150	150	100		300	40
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	1	0	0	0		1	20

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	160	65	12	6	50.00		71	44
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	78	75	75		0		75	96
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	2	2		0		2	20
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	10	2	2	0	0		2	20
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	20	4	4	0	0		4	20
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	20	4	4		0		4	20
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	4	4	0	0		4	20
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65	55	55		0		55	85
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	5	5	5		0		5	100
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10	2	2	0	0		2	20
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang Difasilitasi	15	3	3	0	0		3	20
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10	2	2		0		2	20
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10	4	50	50	100		54	540
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Difasilitasi	15	3	3	0	0		3	20
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	10	2	2	0	0		2	20
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah	10	2	2	0	0		2	20
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	38	2	12	0	0		2	5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	48	71	71.42		0		71.42	149
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	65	11	11		0		11	17

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan PerKades yang disusun	30	6	6	0	0		6	20
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	65	11	11	11	100		22	34
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	65	11	11	11	100		22	34
Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan desa yang sudah diterapkan	15	3	3	0	0		3	20
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	65	11	11	0	0		11	17
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	36	15	6	0	0		15	42
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang difasilitasi	65	11	11	0	0		11	17
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	38	15	15	0	0		15	39
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Pembangunan desa yang disinkronkan	10	2	2	0	0		2	20
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan	10	2	2	0	0		2	20
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	10	2	2	0	0		2	20
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	10	2	2	0	0		2	20
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Perencanaan	65	11	11	0	0		11	17
Fasilitasi Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah MoU yang difasilitasi	125	25	25	0	0		25	20
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	65	11	11	0	0		11	17
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	5	1	1	0	0		1	20
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Yang didampingi diwilayahnya	130	22	22	0	0		22	17
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	10	2	2	0	0		2	20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	67	67	0	0		67	106
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	11	11	5	45.45		16	145
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	3	3	3	100		6	40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	25	5	5	0	0		5	20
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25	5	5	0	0		5	20
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	25	5	5	0	0		5	20
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25	5	5	0	0		5	20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	3	75		7	35
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	0	0		4	20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	60	15	15	6	40		21	35
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	186	45	44	29	65.91		74	40
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	10	10	0	0		10	20
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	12	0	0		12	20
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	40	8	8	0	0		8	20

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	2	2	0	0	2	20
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20	4	4	0	0	4	20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12	12	6	50	18	30
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	2	2	0	0	2	20
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	2677	575	575	0		575	21
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	0	0	1	20
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2611	509	42	0	0	509	19
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	2611	509	509	0	0	509	19
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	2611	509	509	0	0	509	19
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	65	13	13	6	46.2	19	29
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	2611	509	509	0	0	509	19
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	2611	509	509	0	0	509	19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	32	62	62	0		62	194
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	25	5	5	0	0	5	20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	289	62	62	0	0	62	21
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	246	48	48	0	0	48	20
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	10	2	2	0	0	2	20
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2208	528	528	0	0	528	24
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	25	5	5	0	0	5	20
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah ASN pindah Tugas	25	5	5	0	0	5	20
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang pemindahan Tugas	25	5	5	0	0	5	20
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184	44	5	0	0	44	24
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	840	168	168	0	0	168	20
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	3	3	0	0	3	20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8	8	8	0		8	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	153	75	75	0	0	75	49
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66	2	7	6	86	8	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	5	2	0	0	5	31
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51	24	24	1	0	25	49
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	0	4	200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15	3	3	0	0	3	20

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	150	30	30	0	0		30	20
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	6	50		18	150
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	30	12	6	50		36	38
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3032	1000	500	300	60		1300	43
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17	7	7		0		7	41
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	86	18	18	0	0		18	21
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	5	1	1	0	0		1	20
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5	1	1	0	0		1	20
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100	20	20	0	0		20	20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	25	5	5	0	0		5	20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	40	10	10		0		10	25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	6	50		18	150
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2600	1000	12	6	50		1006	39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	840	168	12	6	50		174	21
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600	120	120	0	0		120	20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1404	684	684		0		684	49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	2602	509	509	0	0		509	20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5	1	3	2	66.67		3	60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	20	4	5	4	80		8	40
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	100	20	20	0	0		20	20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	1	10	0	0		1	20
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	125	25	25	0	0		25	20
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	25	5	5	0	0		5	20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	2	2	0	0		2	20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	125	25	25	0	0		25	20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	125	25	25	0	0		25	20

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kota Bangun setelah pemekaran dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah

Keterkaitan antara Renstra Kecamatan Kota Bangun dan perubahannya dengan Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026 memiliki arah yang sama, ditekankan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Kota Bangun dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Kota Bangun mempunyai Program Peningkatan kualitas Pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. Keterkaitan dengan pelayanan, Kecamatan Kota Bangun selalu memberdayakan masyarakat Kecamatan Kota Bangun dengan tujuan agar segala aktifitas yang ada pada wilayah Kecamatan Kota Bangun berjalan lebih baik dan lebih maju. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada table di bawah :

TABEL 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8				12	12	13
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-	Tingkat pelayanan yang aktif	75	75	76	76	77	76	83	70	70	
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	-	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	75	75	76	76	77	71	80	75	75	
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75	75	76	76	77	75	75	75	75	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	-	Pertumbuhan pendapatan Asli Desa	69.70	69.70	72.23	72.23	72.23	36.36	19.52	72.23	72.23	
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	-	Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Untuk indikator sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan bukan lagi kewenangan kecamatan dari tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kota Bangun merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kota Bangun sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.
 - b) Pencapaian SDGs.
 - c) Pengentasan kemiskinan.
 - d) Pencapaian SPM.
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 16 Kegiatan dan 29 sub kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kota Bangun dan melingkupi semua Desa.

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Perubahan Kecamatan Kota Bangun sebesar Rp. 21.790.669.381

- c. Ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) Perubahan Kecamatan Kota Bangun dengan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan suatu kondisi di mana program dan kegiatan yang tercantum dalam RENJA tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dalam RENJA Perubahan, antara lain:

- Perubahan Prioritas: Terjadi perubahan prioritas kecamatan sehingga program dan kegiatan yang sebelumnya direncanakan perlu disesuaikan.
- Keterbatasan Anggaran: Terdapat keterbatasan anggaran yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap pagu indikatif program dan kegiatan.
- Perubahan Kondisi Lingkungan: Terjadi perubahan kondisi lingkungan, baik fisik maupun sosial, yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.
- Kesalahan dalam Penyusunan Rencana: Terdapat kesalahan dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, atau RENJA Perubahan.
- Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program.

- d. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format table berikut ini:

TABEL 3
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun													
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah / berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(2)	(3)		4	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Point	Kota Bangun	8,056,782,626	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Point	Kota Bangun	8,056,782,626	-	67	Point 7,279,154,942
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31	Dokumen	Kota Bangun	60,967,377	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31	Dokumen	Kota Bangun	60,967,377	-	31	Dokumen 605,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Kota Bangun	50,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Kota Bangun	50,000,000	-	3	Dokumen 140,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	Kota Bangun	10,967,377	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	Kota Bangun	10,967,377	-	4	Laporan 70,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Kota Bangun	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Kota Bangun	-	-	2	Dokumen 5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	Kota Bangun	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	Kota Bangun	-	-	2	Dokumen 5,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	Kota Bangun	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	Kota Bangun	-	-	2	Laporan 60,000,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	Kota Bangun	-	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	Kota Bangun	-	-	200	Data 300,000,000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	Kota Bangun	-	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	Kota Bangun	-	-	1	Berita Acara 25,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	Laporan	Kota Bangun	5,551,840,808	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	Laporan	Kota Bangun	5,551,840,808	-	15	Laporan 4,536,966,701

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/bulan	Kota Bangun	5,395,840,808	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/bulan	Kota Bangun	5,395,840,808	-	31	Orang/bulan	4,406,966,701
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	Laporan	Kota Bangun	6,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	Laporan	Kota Bangun	6,000,000	-	2	Laporan	25,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	Kota Bangun	150,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	Kota Bangun	150,000,000	-	12	Laporan	80,000,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	Kota Bangun	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	Kota Bangun	-	-	1	Laporan	25,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	590	Unit	Kota Bangun	197,278,712	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	590	Unit	Kota Bangun	197,278,712	-	590	Unit	272,278,712
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Kota Bangun	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Kota Bangun	-	-	1	Dokumen	25,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42	Dokumen	Kota Bangun	150,000,000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42	Dokumen	Kota Bangun	150,000,000	-	42	Dokumen	150,000,000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	Kota Bangun	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	Kota Bangun	-	-	1	Laporan	50,000,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	Laporan	Kota Bangun	47,278,712	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	Laporan	Kota Bangun	47,278,712	-	13	Laporan	47,278,712
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	44	Orang	Kota Bangun	50,000,000	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	44	Orang	Kota Bangun	50,000,000	-	44	Orang	32,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	Kota Bangun	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	Kota Bangun	-	-	1	Paket	32,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	Kota Bangun	50,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	Kota Bangun	50,000,000	-	5	Orang	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang di sediakan	12	Kegiatan	Kota Bangun	740,500,000	Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang di sediakan	12	Kegiatan	Kota Bangun	739,000,000	(1,500,000)	12	Kegiatan	240,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	Kota Bangun	250,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	Kota Bangun	248,500,000	(1,500,000)	2	Paket	25,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	Kota Bangun	20,500,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	Kota Bangun	20,500,000	-	3	Paket	10,500,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Kota Bangun	35,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Kota Bangun	35,000,000	-	1	Paket	20,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Kota Bangun	50,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Kota Bangun	50,000,000	-	2	Paket	25,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Kota Bangun	20,000,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Kota Bangun	20,000,000	-	12	Laporan	10,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Kota Bangun	315,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Kota Bangun	315,000,000	-	30	Laporan	125,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	Kota Bangun	50,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	Kota Bangun	50,000,000	-	500	Dokumen	25,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Laporan	Kota Bangun	1,173,687,564	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Laporan	Kota Bangun	1,125,856,922	(47,830,642)	12	Laporan	759,251,364
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Kota Bangun	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Kota Bangun	3,000,000	-	12	Laporan	2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Kota Bangun	702,560,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Kota Bangun	654,729,358	(47,830,642)	12	Laporan	402,560,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Kota Bangun	468,127,564	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Kota Bangun	468,127,564	-	12	Laporan	354,691,364
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	26	Unit	Kota Bangun	282,508,165	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	26	Unit	Kota Bangun	284,008,165	1,500,000	26	Unit	226,158,165
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Kota Bangun	3,850,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Kota Bangun	5,350,000	1,500,000	1	Unit	50,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	Kota Bangun	273,658,165	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	Kota Bangun	273,658,165	-	4	Unit	173,658,165
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	Kota Bangun	5,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	Kota Bangun	5,000,000		1	Unit	2,500,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	6	Unit	Kota Bangun		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	6	Unit	Kota Bangun		-	6	Unit	607,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	Kota Bangun	-	umlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	Kota Bangun	-		1	Unit	100,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	Kota Bangun		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	Kota Bangun		-	1	Unit	507,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	Kota Bangun		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	Kota Bangun		-	2	Unit	-

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	Kota Bangun	10,089,053,000	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	Kota Bangun	13,054,353,000	2,965,300,000	100	Persen	7,170,343,000
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	88,10	Persen			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	88,10	Persen				88,10	Persen	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan	176	Kegiatan	Kota Bangun	-	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi	176	Kegiatan	Kota Bangun		-			400,000,000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	Kota Bangun	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	Kota Bangun	-		2	Laporan	150,000,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	Kota Bangun	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	Kota Bangun	-		1	Dokumen	250,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	4	SPM	Kota Bangun	-	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	4	SPM	Kota Bangun					100,000,000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	Kota Bangun	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	Kota Bangun	-		2	Laporan	100,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	Kota Bangun	10,089,053,000	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	Kota Bangun	13,054,353,000	2,965,300,000	2	Kegiatan	6,670,343,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3	Laporan	Kota Bangun	969,053,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3	Laporan	Kota Bangun	969,053,000	-	4	Laporan	1,030,343,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80	Laporan	Kota Bangun	9,120,000,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80	Laporan	Kota Bangun	12,085,300,000	2,965,300,000	28	Laporan	5,640,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	67	Persen	Kota Bangun	408,408,000	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	67	Persen	Kota Bangun	408,408,000	-	67	Persen	586,000,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	36	Kali	Kota Bangun	408,408,000	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	36	Kali	Kota Bangun	486,107,980	77,699,980	36	Kali	100,000,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bangun	30,000,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bangun	30,000,000	-	3	Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	Kota Bangun	378,408,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	Kota Bangun	456,107,980	77,699,980	12	Laporan	50,000,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan									-				486,000,000

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga	Kota Bangun	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga	Kota Bangun	-		4	Lembaga	486,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60	persen	Kota Bangun	216,125,755	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60	persen	Kota Bangun	216,125,755	-	60	persen	215,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan kecamatan	5	kegiatan	Kota Bangun	216,125,755	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan kecamatan	5	kegiatan	Kota Bangun	366,125,775	150,000,020	5	kegiatan	215,000,000
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	Kota Bangun	191,125,755	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	Kota Bangun	341,125,775	150,000,020	50	Orang	210,000,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	Kota Bangun	25,000,000	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	Kota Bangun	25,000,000	-	12	Dokumen	5,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	72	Persen	Kota Bangun	55,000,000	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	72	Persen	Kota Bangun	55,000,000	-	72	Persen	5,000,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	11	Desa	Kota Bangun	55,000,000	Jumlah Desa Yang difasilitasi	11	Desa	Kota Bangun	55,000,000	-	11	Desa	5,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11	Dokumen	Kota Bangun	50,000,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11	Dokumen	Kota Bangun	50,000,000	-	11	Dokumen	-
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6	Dokumen	Kota Bangun	5,000,000	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6	Dokumen	Kota Bangun	5,000,000	-	6	Dokumen	5,000,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	77	Persen	Kota Bangun	-	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	77	Persen	Kota Bangun	-	-	77	Persen	175,000,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													175,000,000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	Kota Bangun	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	Kota Bangun	-	-	2	Laporan	175,000,000
					18,825,369,381						21,970,538,739			15,430,497,942

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kota Bangun. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kota Bangun di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Kecamatan Kota Bangun berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

b. Kecamatan Kota Bangun berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kota Bangun. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad

serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Kota Bangun juga memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang datang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Kota Bangun ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Kota Bangun serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil Perubahan Renja ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada pada Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sesuai dengan program / kegiatan yang ada.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia yang handal, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kota Bangun, 26 Agustus 2024
Camat Kota Bangun,

Drs. Mawardi
NIP. 19660825 199403 1 008

TABEL 4															
PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH															
TAHUN ANGGARAN 2024															
No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA/RKPD 2024				APBD 2024				Usulan Perubahan Renja 2024				Selisih Antara Pagu APBD 2024 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = (14 -10)	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bangun	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Point	7,566,564,847	Kota Bangun	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Point	8,056,782,626	Kota Bangun	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Point	8,008,951,984	(47,830,642)	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Dokumen	60,967,377	Kota Bangun	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Dokumen	60,967,377	Kota Bangun	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	60,967,377	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50,000,000	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10,967,377	Kota Bangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10,967,377	Kota Bangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10,967,377	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	5,061,623,029	Kota Bangun	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	5,551,840,808	Kota Bangun	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	5,551,840,808	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	4,905,623,029	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5,395,840,808	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5,395,840,808	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6,000,000	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	150,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	150,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	150,000,000	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	590 Unit	197,278,712	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	590 Unit	197,278,712	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	590 Unit	197,278,712	-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42 Dokumen	150,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42 Dokumen	150,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42 Dokumen	150,000,000	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	47,278,712	Kota Bangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	47,278,712	Kota Bangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	47,278,712	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	44 Orang	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	44 Orang	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	40 Orang	50,000,000	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50,000,000	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang di sediakan	12 Kegiatan	740,500,000	Kota Bangun	Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang di sediakan	12 Kegiatan	740,500,000	Kota Bangun	Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang di sediakan	7 Kegiatan	739,000,000	(1,500,000)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	250,000,000	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	250,000,000	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	248,500,000	(1,500,000)	Pergeseran Pagu sebesar Rp. 1.500.000 ke Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan karena Kekurangan Bayar Pajak

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20,500,000	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20,500,000	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,500,000	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20,000,000	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	315,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	315,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	315,000,000	-	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50,000,000	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bangun	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1,173,687,564	Kota Bangun	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1,173,687,564	Kota Bangun	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1,125,856,922	(47,830,642)	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	702,560,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	702,560,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	654,729,358	(47,830,642)	Pengurangan Anggaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	468,127,564	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	468,127,564	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	468,127,564	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	26 Unit	282,508,165	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	26 Unit	282,508,165	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	26 Unit	284,008,165	1,500,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3,850,000	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3,850,000	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5,350,000	1,500,000	Penambahan pagu anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 1.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	273,658,165	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	273,658,165	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	273,658,165	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000	Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000	Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5,000,000	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	6 Unit	0	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	6 Unit	0	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	6 Unit	0	0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	Kota Bangun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	Kota Bangun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kota Bangun	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	88,1 Persen 100 Persen	11,954,053,000	Kota Bangun	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	88,1 Persen 100 Persen	10,089,053,000	Kota Bangun	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	88,1 Persen 100 Persen	13,054,353,000	2,965,300,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Bangun	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	11,954,053,000	Kota Bangun	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	10,089,053,000	Kota Bangun	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	13,054,353,000	2,965,300,000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	969,053,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	969,053,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	969,053,000	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80 Laporan	10,985,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80 Laporan	9,120,000,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80 Laporan	12,085,300,000	2,965,300,000	Penambahan Pagu Anggaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Bangun	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	67 Persen	408,408,000	Kota Bangun	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	67 Persen	408,408,000	Kota Bangun	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	67 Persen	486,107,980	77,699,980	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kota Bangun	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	36 Kali	408,408,000	Kota Bangun	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	36 Kali	408,408,000	Kota Bangun	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	36 Kali	486,107,980	77,699,980	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	378,408,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	378,408,000	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	456,107,980	77,699,980	Penambahan Pagu Anggaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Bangun	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60 persen	216,125,755	Kota Bangun	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60 persen	216,125,755	Kota Bangun	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60 persen	366,125,775	150,000,020	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Bangun	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan kecamatan	5 kegiatan	216,125,755	Kota Bangun	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan kecamatan	5 kegiatan	216,125,755	Kota Bangun	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan kecamatan	5 kegiatan	366,125,775	150,000,020	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	191,125,755	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	191,125,755	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	341,125,775	150,000,020	Penambahan Pagu Anggaran
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	25,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	25,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	25,000,000	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kota Bangun	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	72 Persen	55,000,000	Kota Bangun	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	72 Persen	55,000,000	Kota Bangun	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	72 Persen	55,000,000	-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Bangun	Jumlah Desa Yang difasilitasi	11 Desa	55,000,000	Kota Bangun	Jumlah Desa Yang difasilitasi	11 Desa	55,000,000	Kota Bangun	Jumlah Desa Yang difasilitasi	11 Desa	55,000,000	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	50,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	50,000,000	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	5,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	5,000,000	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	5,000,000	-	
					20,200,151,602				18,825,369,381				21,970,538,739	3,145,169,358	